

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya, mengacu kepada standar akuntansi pemerintah, dimana sistem tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi (Moh Khusaini, 2018:120). Selain itu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut, dan pada dasarnya LKPD merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atau penggunaan dana punlik (ABPD) (Moermahadi, 2017:01).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 yang mengharuskan semua pemerintah daerah membuat laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan SKPD dan mencantumkan aset daerah (Jontro, 2018:48). Suatu laporan keuangan pemerintah dinyatakan baik jika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) dari hasil audi BPK-RI (Dito, 2019:2). Opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Karakteristik yang terdapat pada kualitas laporan keuangan, yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Erlina, 2015:8).

Fenomena untuk kualitas laporan keuangan yaitu terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 terdapat masalah yang tidak dapat di tolerir,

sehingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal pada empat tahun terakhir sudah berhasil mendapatkan opini WTP yang berarti laporan keuangan dilakukan dengan baik alias tidak bermasalah. Hal itu pun diikuti oleh 2 daerah lain yang mendapatkan opini WDP pada TA 2018 yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat. Dan pihak Pemprov Jabar akan mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari identifikasi masalah, penyelesaian masalah hingga menyusun rencana aksi pencegahan korupsi (Iwa Karniwa, 2019).

Pengelolaan aset daerah berkaitan dengan pelayan publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara melalui pemanfaatan aset, dan pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting dikarenakan menguatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan (Bambang, 2013:178).

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari komponen yang sangat penting bagi terwujudnya laporan keuangan yang baik (Doli D, 2004:50). Akan tetapi, dalam pengelolaan aset oleh sebagian besar Pemerintah Daerah masih belum dikatakan memadai, hal ini terlihat pada belum banyaknya Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, sebagai akibat dari belum wajarnya pengakuan, pengukuran dan penyajian aset tetap (Bambang, 2013:179).

Aset daerah dalam laporan keuangan merupakan komponen yang terkait dengan neraca daerah baik berbentuk aset tetap maupun aset lancar serta barang yang sifatnya persediaan, merupakan bagian dari pengelolaan aset untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik (Jontro, 2018:47). *The process fixed assets include all activities regarding acquiring, depreciating and managing fixed assets* (Anne and Katrin, 2009:4). Indikator yang terdapat dalam pengelolaan aset tetap daerah yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Sri Wahyuni, 2020:8).

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan aset yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian bersama diantaranya permasalahan pengelolaan aset yang masih bermasalah baik secara penatausahaannya hingga pemanfaatannya. Salah satu daerah yang terdapat masalah pengelolaan aset yaitu Kabupaten Cianjur, yang dinilai pengamanan dan pengelolaan asetnya belum optimal. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana permasalahan material tersebut yang mengganggu kewajaran laporan keuangan (Arman Syifa, 2019).

Pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan seperti keandalan

pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta efektivitas dan efisiensi operasi (Ely Suhayati, 2010:312).

Pengendalian Intern salah satu faktor penunjang kualitas laporan keuangan, serta pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Dito, dkk, 2019:31). *Internal control also can help an organization mitigate the risk of not achieving its objectives* (Karla, 2015:86). Akan tetapi jika terdapat kelemahan dalam pengendalian intern akan mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan pemerintah (Faiz Zamzami, 2011:190).

Entities should asses and document their internal control. If the entity does not view internal control as a priority, then question arise as to whether the control environment is lacking in some respect. The fact is that many entities would rather not bother with this responsibility, despite its overall value to society in adding integrity to investor reports and to the security and success of the entity itself (Lynford Graham, 2015:8).

Pengendalian intern merupakan tanggung jawab bagi manajemen, informasi yang didapat dari pengendalian intern tersebut dapat membantu auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar (Rahmadi Murwanto, 2012:305). Indikator yang terdapat pada pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Wakhyudi, 2018:17).

Fenomena pada pengendalian intern yaitu tiga daerah di Jawa Barat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Menurut Ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Hary Sutrasno dari hasil audit BPK ditemukan sejumlah masalah, salah satunya seperti Kabupaten Cianjur temuan terkait lemahnya pengendalian intern yaitu tindak *fraud* (kecurangan). Hal ini mempengaruhi kelayakan dari laporan keuangan, karena terdapat kesalahan material yang menjadi pengacualian tersebut. Disalah satu kesempatan, menurut Plt Herman Suherman, hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemerintah, serta akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dinas yang bermasalah tersebut agar tidak terulang kembali (Hary Sutrasno, 2019).

Dari pembahasan diatas, maka penulis bermaksud untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan pada bagian latar belakang, maka dapat di identifikasikan masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan terakit pengamanan dan pengelolaan aset yang belum optimal, sehingga mengganggu kewajaran dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Adanya permasalahan terakit lemahnya pengendalian intern berupa tindak kecurangan (*fraud*) yang mempengaruhi kelayakan dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.
2. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) dan Pengendalian Intenal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur, yang nantinya data tersebut akan diolah untuk dianalisis lebih lanjut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaiitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis bertujuan untuk memecahkan masalah secara praktis.

Berikut ini kegunaan praktis, yaitu:

1. Bagi SKPD

Peneliti berharap dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Aset dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, lebih baik kembali dalam mengaplikasikannya, sehingga dapat menghasilkan *output* berupa laporan keuangan secara berkualitas.

2. Staff keuangan dan akuntansi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman, ilmu pengetahuan, dan juga gambaran terkait bagaimana caranya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis untuk pengembangan ilmu dari masalah yang telah dipaparkan. Berikut kegunaan akademis, yaitu:

1. Bagi Peneliti yang lain

Peneliti berharap dari hasil yang telah dipaparkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait topik masalah yang diteliti bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Peneliti berharap dari hasil yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu sesuai dengan masalah yang dibahas bagi para mahasiswa yang khususnya mengambil materi tentang akuntansi sektor publik.

3. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini akan dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait topik yang diambil yaitu tentang Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Cianjur.